

## TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN URUSAN  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS  
DAN MENENGAH KEJURUAN DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG KEPADA PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**SRIYANA**

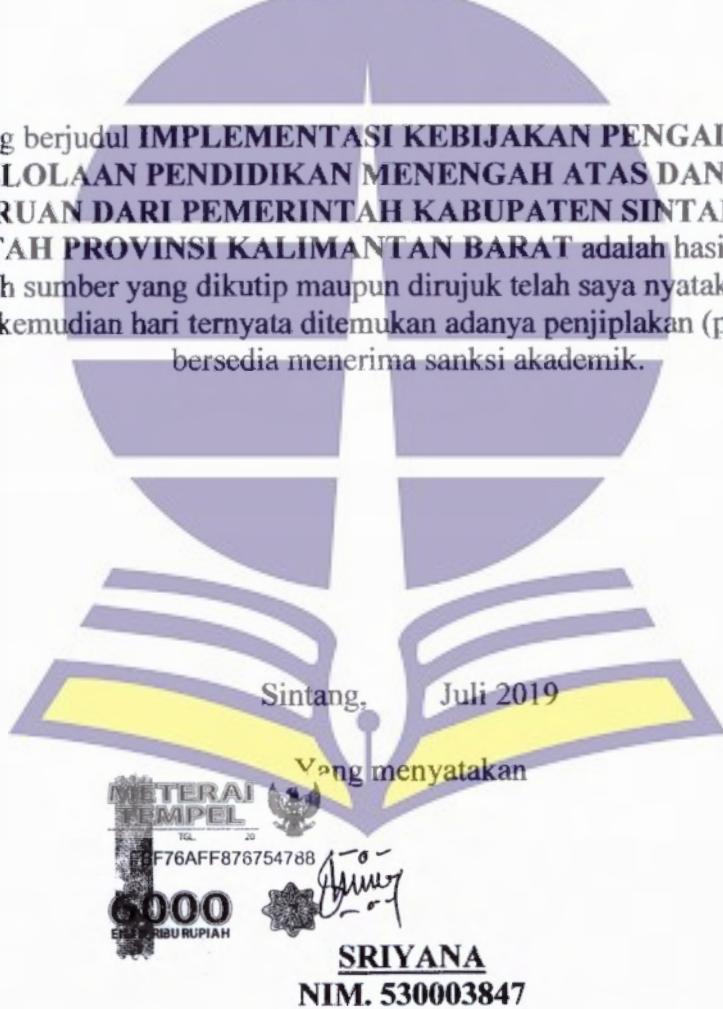
**NIM. 530003847**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2019**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN URUSAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DAN MENENGAH KEJURUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



## **ABSTRAK**

### **Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

**SRIYANA**

**Universitas Terbuka**

Adanya pengalihan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) menjadi urusan pemerintah provinsi sehingga seluruh aset, personil dan pembiayaan dialihkan ke provinsi. Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian, karena pada pasal 404 menyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan dimaksud dilaksanakan paling lanjut 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan. Beberapa pemasalahan terkait Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah: (1) Masalah proses pengalihan personil. Masih banyak personil yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) baik tenaga pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan (tata usaha, penjaga sekolah dan sebagainya) menolak untuk dialihkan statusnya dari pegawai Kabupaten Sintang menjadi pegawai Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan mereka harus berurus ke ibukota provinsi yang jaraknya sangat jauh dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. (2) Masalah proses pengalihan pendanaan dan prasarana. Sebagian besar prasarana pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) baik berupa bangunan gedung sekolah, tanah/lahan sekolah, kendaraan dinas, maupun seluruh peralatan yang ada di sekolah pengadaannya bersumber dari APBD Kabupaten Sintang, sehingga masih ada yang menolak untuk menyerahkannya. Selain itu, sistem pencatatan aset di sekolah yang kurang tertib menyebabkan harus dilakukan pendataan ulang kembali. Permasalahan lainnya adalah masih adanya aset-aset sekolah seperti lahan/tanah yang masih dalam sengketa. (3) Masalah pengalihan dokumen. Pengumpulan dokumen sangat sulit dilakukan karena tersebar di seluruh sekolah yang ada. Bahkan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dinas, tidak diketahui keberadaannya lagi.

**Kata Kunci:** **Implementasi kebijakan, pengalihan urusan, proses pengalihan, pengalihan personil, pengalihan pendanaan, serta pengalihan prasarana dan dokumen**

## **ABSTRACT**

**Implementation of the Policy Transfer of Government Middle and Vocational Secondary Education Management Affairs  
Sintang Regency To the Government  
West Kalimantan Province**

**SRIYANA**

**open University**

The transfer of secondary education (SMA / SMK / MA) affairs to the affairs of the provincial government so that all assets, personnel and financing are transferred to the province. This is important to pay attention to, because article 404 states that the handover of personnel, funding and infrastructure as well as documents (P3D) as a result of the distribution of functions is carried out no later than 2 years after Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is issued. Several issues related to the Implementation of Secondary Education Management Policy Transfer from the Sintang Regency Government to the Government of West Kalimantan Province include: (1) Problems with the process of personnel transfer. There are still many personnel involved in the management of secondary education (SMA / SMK) both educators (teachers) and education staff (administration, school guards and so on) refusing to be transferred from Sintang Regency employees to West Kalimantan Province employees. This is because they have to deal with the provincial capital which is a great distance and of course requires a lot of money. (2) Problems with the process of diverting funding and infrastructure. Most of the infrastructure at the secondary education level (SMA / SMK) in the form of school buildings, school land / land, official vehicles, as well as all the equipment in the procurement school is sourced from the Sintang District APBD, so there are still those who refuse to submit it. In addition, the system of recording assets in schools that are lacking in order has caused re-data collection. Another problem is the existence of school assets such as land / land which is still in dispute. (3) Problems with document switching. The collection of documents is very difficult because it is spread throughout the existing schools. Even some documents such as land certificates, BPKB of official vehicles, are no longer known.

**Keywords:** Policy implementation, transfer of functions, transfer process, transfer of personnel, transfer of funding, and transfer of infrastructure and documents

## Persetujuan TAPM

Judul TAPM : **Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

Penyusun TAPM : **SRIYANA**

NIM : **530003847**

Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Hari/Tanggal : **Minggu, 4 Agustus 2019**

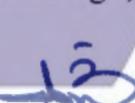
Menyetujui:

Pembimbing II



**Dr. DARMANTO, M.Ed**  
NIP. 19591027 198603 1 003

Pembimbing I,



**Dr. ERDI, M.Si**  
NIP. 19672707 200501 1 001

Penguji Ahli

**Prof. Dr. MARTANI HUSEINI, M.Si**  
NIP. 19510307 197902 1 002

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister  
Administrasi Publik



**Dr. DARMANTO, M.Ed**  
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP



**Dr. SOFIAN ARIPIN, M.Si**  
NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : SRIYANA  
NIM : 530003847  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : **Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 4 Agustus 2019  
Waktu : 11.00 – 12.30 Wiba.

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji  
Rini Yayuk Priyati, S.E, M.Ec., Ph.D**

**Penguji Ahli  
Prof. Dr. Martani Huseini, M. Si**

**Pembimbing I  
Dr. Erdi, M. Si**

**Pembimbing II  
Dr. Darmanto, M. Ed**

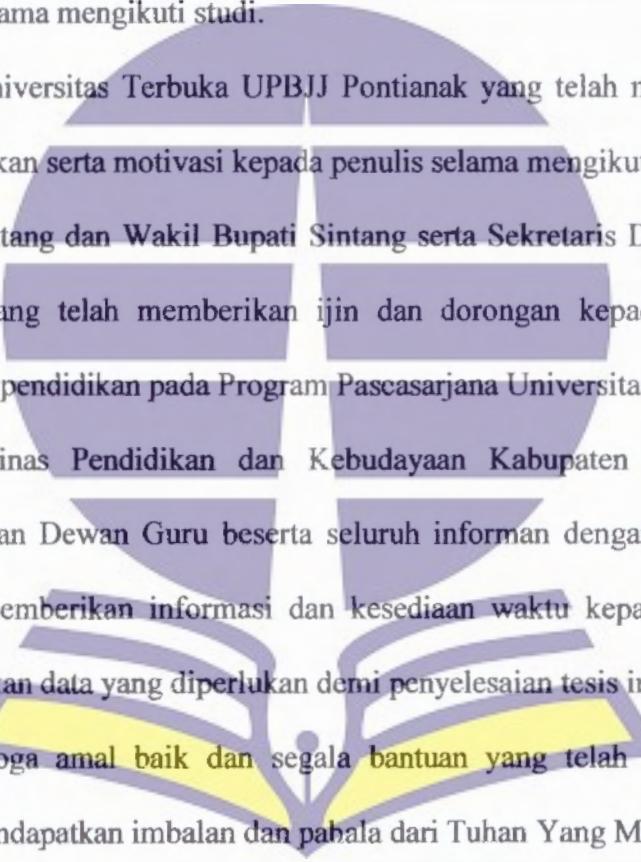


## KATA PENGANTAR

Mengawali Kata Pengantar ini, pertama-tama Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya jualah, akhirnya penyusunan TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat** dapat penulis selesaikan. Adapun Penelitian TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik pada UPBJJ-UT 47 Pontianak.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penulisan ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa **terima kasih** dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh **ketelitian dan kesabaran** tak **henti-hentinya memberikan saran-saran** dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini. Kemudian penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, tanpa keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang tersedia ini penulis mengucapkan **terima kasih** kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka Jakarta

- 
2. Direktur Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
  3. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
  4. Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
  5. Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
  6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta seluruh informan dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian tesis ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sintang,

2019

Penulis

**SRIYANA  
NIM. 530003847**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : SRIYANA  
NIM : **530003847**  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Tempat/Tanggal Lahir : Sintang / 21 Maret 1983

Riwayat Pendidikan : Lulus SD Negeri No. 17 Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun 1995, Lulus Madrasah Tsanawiyah Negeri Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun 1998, Lulus SMA Negeri 3 Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun 2001, Lulus S1 di Universitas Kapuas Sintang tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana UT minat administrasi publik pada tahun 2017.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2002 sampai dengan sekarang sebagai Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Status : Menikah

Suami : Nurdin (Polri)

Anak : Nadin Afifah Salsabila (Pelajar)

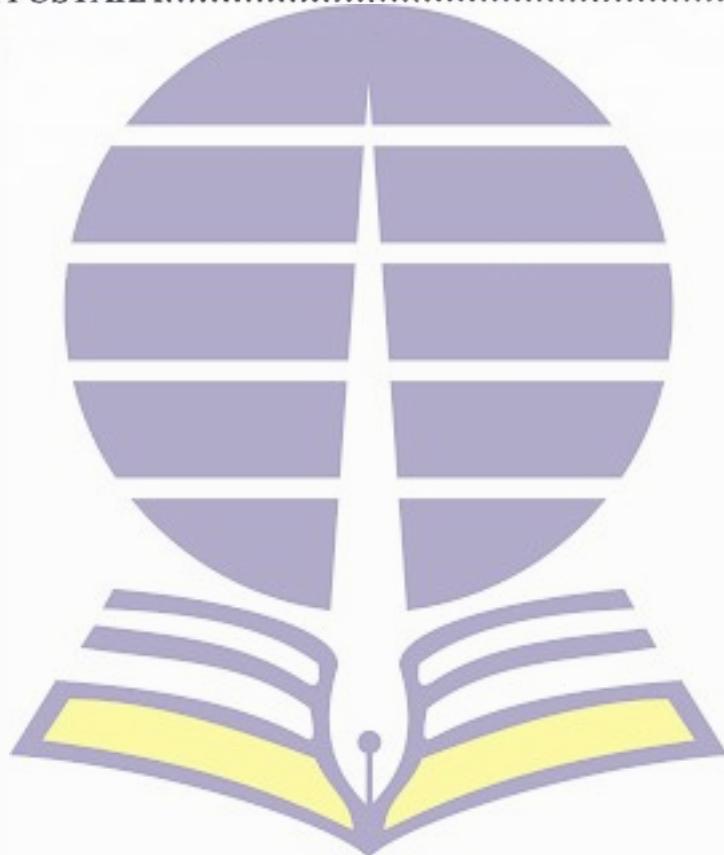
Sintang, 2019

**SRIYANA**  
**NIM. 530003847**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan.....	13
3. Proses Implementasi Kebijakan.....	16
4. Kebijakan Pengalihan Urusan.....	24
5. Kebijakan Pendidikan.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berpikir.....	38
D. Operasionalisasi Konsep.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Desain Penelitian.....	42
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	43
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Analisis Data.....	48
F. Teknik Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	51
B. Hasil.....	61

1. Proses Pengalihan Personil pada SMA/SMK di Kabupaten Sintang.....	61
2. Proses Pengalihan Pendanaan pada SMA/SMK di Kabupaten Sintang.....	82
3. Proses Pengalihan Prasarana dan Dokumen pada SMA/SMK di Kabupaten Sintang .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	4
2.1. Posisi Riset Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di antara Riset-Riset Terdahulu	37
4.1. Sumber Daya Aparatur Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2018	56
4.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2018	57
4.3. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2018	58
4.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2018	59
4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2018	60
4.6. Susunan Tim Penataan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Dokumen Dalam Rangka Pengalihan Urusan Pemerintahan Di Kabupaten Sintang	63
4.7. Susunan Tim Penataan Personil Dalam Rangka Pengalihan Urusan Pemerintahan Di Kabupaten Sintang	67
4.8. Hasil Inventarisir Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Sintang Yang Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat Sebelum Terbit Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016	68

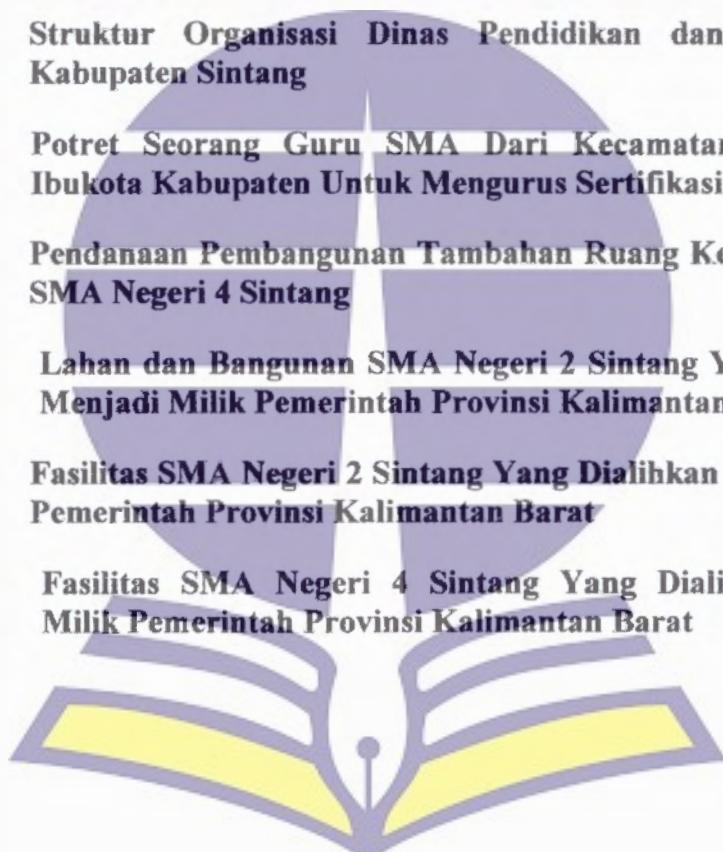
4.9.	Hasil Inventarisir Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Sintang Yang Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat Setelah Terbit Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2016	70
4.10.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Sintang Yang Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat	71
4.11.	Distribusi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Sintang Yang Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Sekolah	72
4.12.	Distribusi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Sintang Yang Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Kelamin	74
4.13.	Distribusi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Sintang Yang Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	75
4.14.	Tahapan Kegiatan Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Dokumen Di Kabupaten Sintang	79
4.15.	Susunan Tim Penataan Pendanaan Dalam Rangka Pengalihan Urusan Pemerintahan Di Kabupaten Sintang	83
4.16.	Jumlah Anggaran Untuk Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2014-2016	84
4.17.	Rincian Anggaran Belanja Pembangunan Untuk Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2014	85
4.18.	Rincian Anggaran Belanja Pembangunan Untuk Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2015	86
4.19.	Rincian Anggaran Belanja Pembangunan Untuk Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2016	87
4.20.	Susunan Tim Penataan Prasarana dan Dokumen Dalam Rangka Pengalihan Urusan Pemerintahan Di Kabupaten Sintang	91

- 4.21. Rincian Aset Tanah Jenjang Pendidikan Menengah Yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 93
- 4.22. Rincian Peralatan Dan Mesin Jenjang Pendidikan Menengah Yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 96
- 4.23. Rincian Bangunan Jenjang Pendidikan Menengah Yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 97
- 4.24. Rincian Prasarana Jaringan Jenjang Pendidikan Menengah Yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 98
- 4.25. Rincian Aset Tetap lainnya Jenjang Pendidikan Menengah Yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 98
- 4.26. Rincian Dokumen Jenjang Pendidikan Menengah Yang Diserahkan Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 99



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
<b>2.1. Kerangka Pikir Penelitian “Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”</b>	<b>42</b>
<b>4.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Potret Seorang Guru SMA Dari Kecamatan Menuju Ke Ibukota Kabupaten Untuk Mengurus Sertifikasi</b>	<b>69</b>
<b>4.3. Pendanaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas Baru Pada SMA Negeri 4 Sintang</b>	<b>83</b>
<b>4.4. Lahan dan Bangunan SMA Negeri 2 Sintang Yang Dialihkan Menjadi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>94</b>
<b>4.5. Fasilitas SMA Negeri 2 Sintang Yang Dialihkan Menjadi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>101</b>
<b>4.6. Fasilitas SMA Negeri 4 Sintang Yang Dialihkan Menjadi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>104</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Hasil Wawancara
3. Pedoman Observasi

